

MAKRO

Presiden Minta APBD Dimanfaatkan untuk Padat Karya

NERACA

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperbanyak program padat karya, agar tercipta banyak lapangan kerja di daerah.

"Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," ujar Presiden Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (15/4).

Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahannya kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/4). Selain program padat karya, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah pusat, ujar Presiden, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial. "Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasaran karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya.

Presiden juga menekankan soal pentingnya peningkatan investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat. "Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksiapan untuk melayani perizinan investasi, kata Presiden, akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. ● [bari](#)

Pemerintah Harap Insentif Pajak Bangkitkan Dunia Usaha

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) berharap seluruh insentif perpajakan yang telah diberikan pemerintah akan mampu membangkitkan dunia usaha dari dampak pandemi COVID-19.

"Kami berharap dapat menjadi stimulus positif bagi pelaku usaha untuk memiliki kekeluasan lebih luas dalam mempertahankan, meningkatkan usaha dan memperluas skala usahanya," kata Direktur Penjualan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor dalam webinar di Jakarta, Kamis (15/4).

Neil menuturkan kebangkitan dunia usaha dari tekanan dampak pandemi akan membuat roda perekonomian terus bergerak dalam jangka panjang terutama UMKM yang berkontribusi hingga 60 persen terhadap PDB Indonesia. Ia menjelaskan untuk mendorong kebangkitan dunia usaha, khususnya UMKM, maka pemerintah telah beberapa kali memperbarui peraturan terkait insentif pajak yakni terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

Ia menjelaskan dalam peraturan tersebut diatur perpanjang waktu insentif pajak dan diberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Insentif pajak telah diberlakukan sejak April hingga Desember 2020 dan dilanjutkan hingga Juni 2021 sedangkan perluas insentif pajak digolongkan menjadi enam bentuk insentif. ● [bari](#)



KOMITMEN HERBALIFE BANTU PEMULIHAN PASCA BENCANA : Senior Director & Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi (kiri) memberi salam sehat kepada Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia Sudirman Said di sela acara penyerahan bantuan secara simbolis bagi warga terdampak bencana, di Markas Pusat PMI, Jakarta, Rabu (14/04/2021). Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, Herbalife Nutrition melalui Herbalife Nutrition Foundation, menyalurkan bantuan dana dan logistik senilai total Rp 456 juta untuk disalurkan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Mamuju, Sulawesi Barat guna membantu pemulihan pasca bencana.

Tantangan Pembangunan Bukit Algoritma

Jakarta - Institute of Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan tiga tantangan dalam pembangunan Silicon valley Indonesia atau yang diberi nama "Bukit Algoritma". "Pertama, ekosistem R&D (Research and Development) di Indonesia masih sangat rendah," kata Kepala Center of Innovation and Digital Economy INDEF, Nailul Huda saat diskusi online di Jakarta, Kamis (15/4).

■ NERACA

Nailul mengatakan proporsi dana R&D terhadap PDB secara total masih kecil yakni hanya 0,24 persen. Begitu juga dengan proporsi dana R&D terhadap PDB yang dihasilkan sektor bisnis swasta yang hanya menyumbang 0,017 persen. Hal tersebut berdampak kepada ekspor manufaktur high-technology di Indonesia yang masih rendah.

Berdasarkan data Bank Dunia 2021, ekspor manufaktur high-tech di Indonesia hanya 8,1 persen. Jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang masing-masing 51,85 persen, 23,01 persen, dan 40,44 persen. "Padahal untuk membangun tempat yang khusus membangun teknologi, diperlukan industri

high-tech yang menjamur di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, lanjut Nailul, inovasi Indonesia tak cukup baik sehingga ICOR Indonesia berada di angka 6,7, nomor empat terbawah dibandingkan negara-negara ASEAN. Kebijakan pendanaan R&D seperti tax allowance juga belum berdampak efektif. "Artinya modal yang dimasukkan negeri tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau bisa dibalang ongkos inovasi semakin mahal," ungkap dia.

Kemudian tantangan kedua adalah sumber daya manusia. UNESCO mencatat jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah yakni 216 orang dari 1 juta penduduk. Begitu juga dengan komposisi proporsi

penduduk yang mampu mengoperasikan komputer dengan mahir, jumlahnya hanya 3,5 persen dari penduduk muda dan dewasa.

Survei dari AFTECH juga mengatakan terdapat gap talenta antara penawaran dan permintaan tenaga kerja sektor "Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya untuk pekerjaan data dan analisa dan program di industri fin-tech. Akibatnya, 36 persen perusahaan fin-tech memperkerjakan asing. "Saya rasa ini menjadi catatan juga bahwa sumber daya manusia menjadi hal yang penting sebelum kita melangkah ke Silicon Valley," ujar Nailul.

Sedangkan tantangan yang ketiga adalah ketimpangan digital dimana sektor TIK hanya dinikmati oleh kalangan berada dan berpusat di Pulau Jawa dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta sebagai pusat TIK. Data Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 50 persen rumah tangga di perkotaan telah menikmati layanan internet, sedangkan di pedesaan baru 26,56 persen.

"Nilai yang menjadi anomali juga ketika Silicon Valley ala Indonesia itu dikhususkan untuk petani

di Indonesia. Bagaimana caranya petani di desa bisa menggunakan teknologi tetapi aksesnya sangat rendah dan bagaimana cara mereka memanfaatkan Silicon Valley," papar dia. Silicon Valley ala Indonesia atau Bukit Algoritma akan dibangun pada lahan seluas 888 hektare di Cikidang dan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat dengan nilai total proyek mencapai Rp18 triliun. Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menyarankan agar kawasan pusat teknologi Bukit Algoritma di Sukabumi, Jawa Barat. dapat mengajak perusahaan teknologi besar untuk masuk agar kawasan tersebut bisa dikembangkan sejajar dengan kawasan Silicon Valley di Amerika Serikat.

"Anda perlu menarik satu perusahaan teknologi besar untuk masuk ke ke kawasan technology center tersebut (Bukit Algoritma) dan membangun fasilitas pendidikan atau kampus di sana, kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan teknologi lainnya dalam rangka menggerakkan momentum pengembangan kawasan technology center," ujar Country Head JLL Indonesia James Allan. ● [bari](#)

BURSA & FINANSIAL

Sektor Penerbangan Diprediksi Membaik di Awal 2022

NERACA

Jakarta - Pemulihan sektor penerbangan diprediksi akan mulai membaik pada awal tahun 2022 untuk penerbangan domestik dan akhir tahun 2023 untuk penerbangan internasional, kata Pakar dan Peneliti Hukum Penerbangan dan Pembiayaan Pesawat Udara Universitas Pajajaran Prita Amalia.

"Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi sebagai strategi pemulihan sektor penerbangan, seperti bantuan fiskal untuk pengurangan beban operasional," kata Prita Amalia yang juga Tim Riset Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia/INACA dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/4).

Dia juga menegaskan bahwa bangkitnya sektor transportasi di Indonesia merupakan tanda bangkitnya perekonomian Indonesia. Karena itu, vaksinasi merupakan game changer pemulihan sektor penerbangan di Indonesia, sehingga diperlukan adanya kebijakan atau regulasi untuk mengakselerasi program vaksinasi sehingga kekebalan masyarakat bisa segera terbentuk dan terciptanya aktivitas masyarakat yang juga dapat mendukung sektor penerbangan.

Prita menjelaskan untuk merumuskan INACA Paper pihaknya telah melakukan sejumlah kajian untuk proyeksi pemulihan sektor penerbangan. Diantarannya melalui aspek kesehatan terkait pengaturan vaksin dan pendistribusiannya.

Juga aspek stimulus ekonomi terkait dukungan Pemerintah untuk sektor transportasi udara dan aspek yang terakhir dari aspek kebijakan yang hal ini terkait regulasi pembatasan pergerakan orang dan regulasi yang berkaitan dengan kapasitas penerbangan.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan bahwa kajian INACA White Paper berupa proyeksi pemulihan industri penerbangan, berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak eksternal melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang telah diselenggarakan pada bulan Februari hingga April 2021. Hal ini juga didasari bahwa industri penerbangan merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi virus COVID-19. ● [bari](#)

Pengembangan Energi Terbarukan Harus Melihat Aspek Geografis

NERACA

Jakarta - Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Deendarlianto mengatakan pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia harus berbasis potensi lokal dengan melihat aspek geografis di setiap daerah. "Target bauran energi 23 persen tahun 2025 dan 31 persen di tahun 2050 harus menjadi kesempatan kita dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengembangkan energi berbasis potensi lokal," katanya dalam siaran pers UGM Talks yang diterima di Jakarta, Kamis (15/4).

Sebagai negara khatulistiwa yang memiliki curah hujan cukup banyak dan pancaran radiasi matahari cukup tinggi, maka potensi ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan energi surya.

Indonesia tercatat memiliki rata-rata daya radiasi matahari sebesar 1.000 Watt per meter persegi. Potensi terbesar terletak di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua yang memiliki intensitas radiasi mencapai 5.747 dan 5.720 Watt per meter persegi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terintegrasi.

Selanjutnya, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau ring of fire juga dapat menghasilkan potensi energi panas bumi yang cukup besar.

Dari beberapa data yang dirilis oleh pemerintah, lanjut Deendarlianto, sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Namun angka itu perlu divalidasi lagi agar menyakinkan para investor yang akan masuk ke Indonesia. ● [bari](#)

PT PRATAMA WIDYA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN				
31 Desember 2020 dan 2019				
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)				
ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	
			31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	4.033.238.145	4.892.955.801		
Piutang usaha - neto	70.223.574.974	59.352.085.178		
Piutang retensi - neto	13.970.042.185	16.401.282.485		
Tagihan bruto kepada pemberi kerja - neto	51.308.980.766	59.948.981.749		
Piutang lain-lain	1.205.752.848	983.451.497		
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka	-	60.346.236		
Pekerjaan dalam pelaksanaan	16.309.843.392	23.385.506.071		
Aset lancar lainnya	75.638.953.971	10.916.565.142		
Total Aset Lancar	232.690.386.281	175.941.154.159		
ASET TIDAK LANCAR				
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	2.513.500.000	963.500.000		
Aset tetap - neto	200.306.914.779	168.748.857.224		
Aset tidak lancar lainnya	319.914.565	328.400.000		
Total Aset Tidak Lancar	203.140.329.344	170.040.757.224		
TOTAL ASET	435.830.715.625	345.981.911.383		
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	-	-	3.892.209.534	13.082.206.652
Utang usaha	10.163.697.416	16.928.770.986	10.163.697.416	16.928.770.986
Pihak ketiga	1.256.683.444	8.011.532.460	1.256.683.444	8.011.532.460
Pihak beresali	980.246.830	1.205.757.072	980.246.830	1.205.757.072
Utang pajak	881.058.856	5.323.393.773	881.058.856	5.323.393.773
Beban akrual	6.439.572.570	9.757.148.342	6.439.572.570	9.757.148.342
Utang muka dari pemberi kerja	-	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	15.870.130.422	14.477.526.095	15.870.130.422	14.477.526.095
Utang pembiayaan konsumen	2.942.508.087	3.911.333.540	2.942.508.087	3.911.333.540
Total Liabilitas Jangka Pendek	42.426.107.159	72.697.668.920	42.426.107.159	72.697.668.920
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan kerja	58.662.974	2.292.044.795	58.662.974	2.292.044.795
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	9.259.462.203	18.297.390.553	9.259.462.203	18.297.390.553
Utang pembiayaan konsumen	217.428.883	2.632.206.933	217.428.883	2.632.206.933
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.722.219.286	24.749.459.656	11.722.219.286	24.749.459.656
Total Liabilitas	54.148.326.445	97.447.128.576		
EKUITAS				
Modal dasar - 2.810.200.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	-	-	-	-
Modal ditempatkan dan disetor - 878.187.500 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 702.550.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019	87.818.750.000	70.255.000.000	87.818.750.000	70.255.000.000
Tambahan modal disetor	94.001.250.000	977.500.000	94.001.250.000	977.500.000
Penghasilan komprehensif lain	443.794.414	879.431.282	443.794.414	879.431.282
Saldo laba	199.418.594.766	176.422.851.525	199.418.594.766	176.422.851.525
Total Ekuitas	381.682.389.180	248.534.782.807		
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	435.830.715.625	345.981.911.383		

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS					
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)					
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba	Total Ekuitas
Saldo 1 Januari 2019	24.675.000.000	977.500.000	283.925.513	129.643.992.837	155.580.418.350
Penambahan modal saham	45.580.000.000	-	-	-	45.580.000.000
Laba neto periode berjalan	-	-	-	46.778.858.688	46.778.858.688
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	595.505.769	-	595.505.769
Saldo 31 Desember 2019	70.255.000.000	977.500.000	879.431.282	176.422.851.525	248.534.782.807
Penyusutan saldo atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")	-	-	-	(8.045.796.082)	(8.045.796.082)
Saldo 1 Januari 2020	70.255.000.000	977.500.000	879.431.282	176.422.851.525	248.534.782.807
Penambahan modal saham	17.563.750.000	-	-	17.563.750.000	17.563.750.000
Agio saham	-	-	-	96.600.625.000	96.600.625.000
Beban emisi saham	-	-	-	(3.576.875.000)	(3.576.875.000)
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	31.041.539.323	31.041.539.323
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(435.636.868)	-	(435.636.868)
Saldo 31 Desember 2020	87.818.750.000	94.001.250.000	443.794.414	199.418.594.766	381.682.389.180

Catatan:
1. Informasi Keuangan diatas, diambil dari laporan Keuangan PT Pratama Widya Tbk, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukitmo dan Rekan yang dalam laporannya tertanggal 8 April 2021 menyatakan bahwa laporan Keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pratama Widya Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata terimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.
3. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp14,105/AS\$1 (2019: 13,901/AS\$1).

Jakarta, 16 April 2021
PT Pratama Widya Tbk
Direksi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAJIN		
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		
	2020	2019
PENDAPATAN	187.886.276.093	182.181.039.109
BEBAN POKOK PENDAPATAN	108.366.465.300	87.091.702.989
LABA BRUTO	79.519.810.793	95.089.336.140
Beban umum dan administrasi	(39.639.008.555)	(42.120.636.774)
Beban keuangan	(9.770.431.766)	(7.170.958.793)
Penghasilan lain-lain - neto	969.535.971	981.118.115
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	31.079.906.443	46.778.858.688
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(38.367.120)	-
LABA NETO	31.041.539.323	46.778.858.688
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAJIN	Pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rug:	
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	(435.636.868)	595.505.769
LABA KOMPREHENSIF NETO	30.605.902.455	47.374.364.457
LABA PER SAHAM DASAR	36,08	139,18

LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		
	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	176.805.238.783	178.911.716.660
Pembayaran kepada pemasok	(107.120.014.576)	(114.975.281.424)
Pembayaran kepada karyawan	(23.257.225.291)	(16.655.353.389)
Pembayaran lainnya	(16.245.454.748)	(14.951.816.754)
Kas yang diperoleh dari operasi	30.182.544.168	33.329.305.093
Penerimaan dari penghasilan bunga	84.399.363	223.325.158
Pembayaran beban keuangan	(5.019.298.806)	(6.517.973.195)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	25.247.854.725	27.034.657.056
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Uang muka perolehan aset tetap	(62.459.628.896)	-
Perolehan aset tetap	(53.382.108.819)	(72.177.635.901)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	462.276.042	-
Penempatan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(1.550.000.000)	(963.500.000)
Penerimaan dari piutang pihak beresali	-	13.628.789.308
Pembayaran untuk piutang pihak beresali	-	(11.922.889.228)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(116.929.461.663)	(71.335.055.819)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan setoran modal	17.563.750.000	45.580.000.000
Penerimaan agio saham	96.600.625.000	-
Penerimaan dari utang bank	22.067.500.000	19.466.702.004
Pembayaran untuk:		
Utang bank	(29.712.824.023)	(22.363.484.012)
Utang pembiayaan konsumen	(4.207.223.503)	(217.966.791)
Utang pihak beresali	(2.299.741.074)	(4.247.988.556)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	100.012.086.400	38.217.262.645
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	8.330.279.462	(6.083.136.118)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	(8.189.250.851)	(2.106.114.733)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	141.028.611	(8.189.250.851)
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas dan setara kas	4.033.238.145	4.892.955.801
Cerukan	(3.892.209.534)	(13.082.206.652)
Neto	141.028.611	(8.189.250.851)

PENGUMUMAN Pemanggilan